

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengamanan Aset Tetap

Raisa Anggita Pratami¹, Yanti Rufaedah²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail: raisa.anggita.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail: yanti.rufaedah@polban.ac.id

ABSTRAK

Aset tetap memiliki peran besar dalam pemerintahan, karena membantu melancarkan aktivitas operasional dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, keamanannya menjadi perhatian utama untuk diupayakan. Akan tetapi yang terjadi di pemerintah Kabupaten Garut tidak demikian. Pada tahun 2018 terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan masih banyaknya aset tetap yang tidak aman, maka untuk menjamin pengamanan aset diperlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan maupun parsial terhadap pengamanan aset tetap di pemerintah Kabupaten Garut. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasinya adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di pemerintah Kabupaten Garut, dan sampelnya yaitu 32 SKPD dengan jumlah responden sebanyak 64 pegawai. Sumber data dari data primer dan sekunder. Metode analisis data menggunakan uji regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara simultan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap sebesar 78,5% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun secara parsial hanya penilaian risiko dan kegiatan pengendalian yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap, sedangkan lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengamanan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Garut.

Kata Kunci

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengamanan Aset Tetap, Laporan Hasil Pemeriksaan

1. PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan bagian yang penting dalam pemerintahan, dilihat dari nilainya yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan jika dibandingkan komponen lainnya.[5] Selain itu, peran aset tetap besar dari segi fungsinya. Aset tetap tanah digunakan untuk membuat sarana prasarana pemerintahan seperti gedung dan bangunan berfungsi sebagai tempat melakukan berbagai pelayanan. Aset tetap kendaraan berfungsi sebagai alat transportasi aparatur negara untuk mempercepat mobilitas ketika bekerja. Oleh karena itu tanpa adanya aset tetap, penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar. Dilihat dari pentingnya aset tetap dalam pemerintahan, maka keberadaannya harus aman dari berbagai gangguan seperti rusaknya atau hilangnya aset, pencatatan dan pelaporan aset yang tidak dilakukan secara lengkap dan tepat waktu, maupun aset yang masih belum mempunyai status kepemilikan yang jelas. Sehingga aset tetap perlu dikelola dan diamankan dengan baik untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah dalam melayani masyarakat. Untuk menjamin pengelolaan dan pengamanan aset diperlukan sistem pengendalian internal pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem ini bertujuan untuk mencapai

efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan dari pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun lima unsurnya, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.[8] Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terdapat sebelas tahap proses pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan salah satu tahapannya yaitu pengamanan aset merupakan salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal pemerintah. Pengamanan aset merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengelola BMN/D meliputi bentuk fisik, administrasi, dan hukum.[7] Ervian (2018) juga menyebutkan bahwa tujuan dari pengendalian intern salah satunya yaitu untuk melindungi harta atau aktiva dalam suatu organisasi serta pencatatan pembukuannya. Sistem pengendalian intern dibentuk untuk mencegah atau menemukan aktiva yang hilang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern yang dibuat salah satunya yaitu sebagai alat untuk pengamanan aset.[1]

Sistem pengendalian internal pemerintah harus dilaksanakan dengan baik didukung dengan sumberdaya berkualitas, agar dapat menjamin proses

pengamanan aset seperti melindungi keberadaan aset, pencatatan aset menghasilkan informasi yang lengkap, dan aset yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Begitu pula dengan proses pengamanan aset yang harus dilaksanakan dengan baik agar kebutuhan aset dapat terpenuhi secara optimal. Apabila pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka tentunya akan meningkatkan keberhasilan dalam pengamanan aset, begitupun jika sistem pengendalian internal pemerintah tidak dijalankan dengan baik, akan berpengaruh terhadap pengamanan aset. Hal ini terbukti dengan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai lemahnya pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah menimbulkan permasalahan dalam pengamanan aset tetap.

Adapun beberapa temuan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Garut tahun 2018 yang bersumber dari buku dua mengenai masih banyaknya aset berupa tanah belum didukung sertifikat kepemilikan. Dari hasil pemeriksaan dokumen kepemilikan aset, tahun 2018 total aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Garut sebanyak 2.331 bidang, baru sebanyak 282 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat, sedangkan sisanya sebanyak 2.049 bidang tanah belum memiliki sertifikat kepemilikan.[3] Hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada pegawai di Bidang Pengelolaan BMD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang mengkonfirmasi kebenaran bahwa masih banyaknya aset berupa tanah yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan.

Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa masih banyaknya aset di Kabupaten Garut yang belum dicatat dengan baik. Pencatatan aset yang tidak informatif mengakibatkan keberadaan aset berpotensi tidak dapat diidentifikasi. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil pemeriksaan BPK terhadap Kartu Inventaris Barang dari Aplikasi Atisisbada yang menunjukkan pencatatan terhadap aset tetap tidak dilakukan secara memadai. Total aset tetap yang belum tercatat dengan baik sehingga tidak memberikan informasi yang memadai terdiri dari 23 aset tanah, 76 aset peralatan dan mesin, 139 aset gedung dan bangunan, dan 820 aset jalan, jaringan, dan instalasi senilai Rp. 352.815.215.448,99.[3] Jika pencatatannya tidak lengkap, maka aset sulit untuk diidentifikasi karena kurangnya informasi yang diperoleh. Implikasinya jika tidak dapat diidentifikasi, aset tersebut sulit ditemukan dan dapat menimbulkan terjadi resiko hilangnya aset. Hal tersebut berdampak merugikan terhadap pengamanan aset di pemerintah Kabupaten Garut. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal dalam mengoptimalkan pengamanan aset. Penelitian Nina Supiarti (2016) menyebutkan bahwa SPIP

berpengaruh secara simultan terhadap pengamanan barang milik negara sebesar 64,4%. [10] Begitupun dengan penelitian lain dari Ervina Abdullah (2015) juga menyebutkan bahwa SPIP berpengaruh secara simultan terhadap pengamanan aset sebesar 73,4%. [1] Sehingga rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pengaruh SPIP secara simultan terhadap Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut?
3. Bagaimana pengaruh unsur-unsur dari SPIP secara parsial terhadap pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan SPIP dalam Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan terhadap Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh unsur-unsur dari SPIP secara parsial terhadap pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengelolaan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur SPIP terdiri atas: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan pengendalian intern.[8] Sistem pengendalian intern dalam pengamanan aset harus handal untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah harus dapat menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang dapat mendorong pada perilaku positif. Utamanya adalah mendorong tersedianya seluruh pengelola aset yang memiliki kesadaran kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern. Penciptaan ini dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh pegawai, komitmen terhadap kompetensi setiap komponen organisasi, adanya

kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya, sebagai pondasi untuk seluruh proses pengamanan dalam pengelolaan aset.

2.2 Pengamanan Aset Tetap

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 arti pengamanan aset atau pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Adapun pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpangan dokumen kepemilikan, sedangkan pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.[6]

2.3 Hipotesis Penelitian

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ha: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap.
2. Ha_{1,2,3,4,5} : Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, sedangkan penelitian deskriptif menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.^[9] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen sistem pengendalian internal pemerintah beserta unsur-unsurnya secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen pengamanan aset tetap dengan alat bantu *software* SPSS versi 25.0.

Populasi dalam penelitian ini merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Garut, dengan menggunakan teknik *non-probability*

sampling diperoleh sampel sebanyak 32 SKPD. Untuk menentukan banyaknya responden menggunakan pendekatan *purposive sampling* sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 64 pegawai, dimana setiap SKPD diambil sampel 2 orang pegawai yaitu pengurus barang atau pengelola aset.

Jenis data yang digunakan adalah data subjek yang diperoleh langsung dari 64 pegawai. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan pegawai sebagai pengurus barang atau pelepas aset, dan untuk menguatkan data informasi dilakukan wawancara dengan pegawai di bagian pengelolaan dan pengamanan BMD pada BPKAD.

3.2 Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode uji regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu *software* SPSS versi 25.0. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji keabsahan dan keandalan dari kuesioner sebagai instrument penelitian, yang akan disebar kepada responden.^[2] Kemudian melakukan analisis deskriptif dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Adapun dalam membuktikan hipotesis, dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah memiliki hubungan positif atau negatif.^[2] Adapun persamaan regresi linier berganda untuk meneliti pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (variabel X) terhadap Pengamanan Aset Tetap (variabel Y), yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e \quad (1)$$

Keterangan :

Y	=	Pengamanan Aset Tetap
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien regresi
X ₁ , X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅	=	Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
e	=	Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari uji regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu statistika *software* SPSS 25.0 disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,306	3,631		2,012	0,049
sum X1	0,132	0,218	0,072	0,607	0,546
sum X2	1,400	0,399	0,330	3,504	0,001
sum X3	0,484	0,0145	0,380	3,330	0,002
sum X4	0,430	0,383	0,117	1,122	0,266
sum X5	0,477	0,430	0,101	1,108	0,273

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (variabel X) terhadap Pengamanan Aset Tetap (variabel Y) yaitu sebagai berikut:

$$Y = 7,306 + 0,132X_1 + 1,400X_2 + 0,484X_3 + 0,430X_4 + 0,477X_5 \quad (2)$$

Keterangan :

- X₁ = Lingkungan Pengendalian
- X₂ = Penilaian Risiko
- X₃ = Kegiatan Pengendalian
- X₄ = Informasi dan Komunikasi
- X₅ = Pemantauan

Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan koefisien determinasi:

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,886 ^a	,785	,766	3,231

a. Predictors: (Constant), sum X5, sum X4, sum X2, sum X3, sum X1

4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan terhadap Pengamanan Aset Tetap

Hasil dari pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R² sebesar 0,785, kemudian dilakukan perhitungan dengan koefisien determinasi tersebut untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengamanan aset tetap secara simultan. Dari perhitungan tersebut diperoleh pengaruh sebesar 78,5% dan sisanya 21,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

Adapun sesuai wawancara yang dilakukan oleh penulis, didapat bahwa secara keseluruhan bersama-sama (simultan), sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pengamanan aset. Hal tersebut dapat dilihat ketika pengendalian intern dalam proses pengamanan aset tidak dilaksanakan

dan dikendalikan dengan baik, maka akan berpengaruh pada proses pelaksanaan pengamanan aset tersebut. Misalnya ketika masih kurangnya pengendalian terhadap informasi aset yang diperoleh, pencatatannya pun akan tidak lengkap, dan aset yang terkait sulit untuk diidentifikasi, hal tersebut dapat memberi peluang yang besar pada kehilangan aset. Ketika aset tersebut hilang maka pelaksanaan pengamanan aset menjadi terhambat dan mengganggu prosesnya. Dengan hal tersebut, maka dari itu perlunya sistem pengendalian intern yang baik dan terkendali agar pelaksanaan pengamanan aset pun dapat berjalan dengan lancar. Adapun terdapat persamaan dengan penelitian dari Piter dkk (2018) yang menyebutkan bahwa masih terjadinya kekurangan dalam penerapan dan pelaksanaan SPIP terhadap BMD sehingga masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik.^[4]

4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial terhadap Pengamanan Aset Tetap

4.2.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Pengamanan Aset Tetap

Hasil dari pengujian data yang dilakukan menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian memiliki nilai t hitung sebesar 0,607 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,001 dengan sig 0,546. Hal tersebut membuktikan bahwa lingkungan pengendalian tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa kondisi dilapangan yang terjadi mengenai lingkungan pengendalian di pemerintah Kabupaten Garut masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pengendalian tersebut, seperti lebih menegakkan integritas, nilai etika dan komitmen dalam bekerja, kemudian masih adanya kekurangan dalam menjalin hubungan kerja antar pegawainya. Contohnya yaitu masih banyaknya pegawai yang kurang memiliki disiplin dan berkomitmen akan pekerjaannya, seperti tidak melakukan pekerjaan mengurus aset dengan baik, yang akan berdampak pada penyalahgunaan atau bahkan hilangnya aset. Sehingga pelaksanaan pengendalian perlu untuk ditingkatkan.

4.2.2 Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Pengamanan Aset Tetap

Hasil dari pengujian data yang dilakukan menunjukkan bahwa penilaian risiko memiliki nilai t hitung sebesar 3,504 lebih besar dari t tabel yaitu 2,001 dengan sig 0,001. Hal tersebut membuktikan bahwa penilaian risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa kondisi dilapangan yang terjadi mengenai penilaian risiko terhadap pengamanan aset tetap telah dilaksanakan, yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Pegawai memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap risiko yang dapat terjadi, kemudian dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko tersebut. Dengan itu, Pemerintah Kabupaten Garut sudah melakukan upaya identifikasi dan analisis risiko terhadap aset tetap yang dimiliki dan diketahui keberadaannya. Contohnya yaitu aset tetap berupa tanah yang telah diberikan tanda kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, agar tidak digunakan oleh masyarakat secara bebas. Maka, pengelola aset lebih mudah melakukan pengecekan terhadap aset tetap berupa tanah tersebut.

4.2.3 Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Pengamanan Aset Tetap

Hasil dari pengujian data yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian memiliki nilai t hitung sebesar 3,330 lebih besar dari t tabel yaitu 2,001 dengan sig 0,002. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa kondisi dilapangan yang terjadi mengenai kegiatan pengendalian terhadap pengamanan aset tetap telah dilaksanakan, seperti meliputi melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada, pengendalian fisik terhadap aset tetap, dan pemisahan fungsi dan tugas pegawai. Pegawai memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pengendalian terhadap pengamanan aset tetap. Contohnya telah dilakukan berbagai pembinaan, seminar, maupun pendidikan dan latihan mengenai pengamanan aset yang diikuti oleh pegawai, dengan tujuan agar pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pegawai semakin banyak. Maka, pengelola aset lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya.

4.2.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Pengamanan Aset Tetap

Hasil dari pengujian data yang dilakukan menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi memiliki nilai t hitung sebesar 1,122 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,001 dengan sig 0,266. Hal tersebut membuktikan bahwa informasi dan komunikasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa kondisi dilapangan yang terjadi mengenai informasi dan komunikasi di pemerintah

Kabupaten Garut masih memiliki kekurangan. Maka perlu meningkatkan informasi dan komunikasi yang dijalin dengan baik antara pengurus barang, seperti meliputi memanfaatkan berbagai bentuk sarana untuk komunikasi, mengelola dan mengembangkan sistem informasi yang ada. Contohnya yaitu tidak semua aset yang dimiliki oleh Dinas terkait dimuat dan diinformasikan dalam kartu inventaris barang, hal tersebut terjadi akibat dari kurangnya informasi yang diperoleh mengenai aset tersebut, dan kurangnya komunikasi antar pegawainya, sehingga masih terjadi kurangnya koordinasi.

4.2.5 Pengaruh Pemantauan terhadap Pengamanan Aset Tetap

Hasil dari pengujian data yang dilakukan menunjukkan bahwa pemantauan memiliki nilai t hitung sebesar 1,108 lebih kecil dari t tabel yaitu 2,001 dengan sig 0,273. Hal tersebut membuktikan bahwa pemantauan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa kondisi dilapangan yang terjadi mengenai pemantauan di pemerintah Kabupaten Garut masih belum dilaksanakan secara optimal, maka perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Contohnya yaitu masih adanya aset yang hilang, kemudian tidak dicatat dengan lengkap dan baik. Hal tersebut akibat dari kurangnya pemantauan yang dilakukan, maka kesalahan tersebut masih saja terjadi. Untuk meminimalisis kesalahan yang dapat terjadi, maka diperlukan pemantauan yang dilakukan secara berkala.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengamanan Aset Tetap di pemerintah Kabupaten Garut telah dirancang dengan baik, hanya saja dalam penerapannya masih belum dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurang tercipta dan dipeliharanya lingkungan pengendalian dalam pengamanan aset tetap yang dapat berdampak pada penyalahgunaan atau bahkan hilangnya aset, kemudian masih kurangnya informasi dan komunikasi yang dijalin dengan baik antara pengurus barang yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pengamanan aset tetap, dan masih kurangnya pemantauan yang dilaksanakan secara berkala terhadap pelaksanaan pengamanan aset tetap di pemerintah Kabupaten Garut.

2. Secara simultan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap yaitu sebesar 78,5% dan sisanya 21,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal tersebut membuktikan bahwa dari baik atau lemahnya pelaksanaan SPIP dapat mempengaruhi pada proses pengamanan aset tetap.
3. Secara parsial dari unsur-unsur SPIP, hanya penilaian risiko (X2) dan kegiatan pengendalian (X3) yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap, sedangkan lingkungan pengendalian (X1), informasi dan komunikasi (X4), dan pemantauan (X5) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Garut dalam memperbaiki implementasi SPIP nya agar pengamanan aset terjaga adalah :

1. Meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengamanan aset tetap, agar dalam pelaksanaannya berjalan lebih baik.
2. Agar lebih mengoptimalkan koordinasi dalam pengelolaan BMD dengan lembaga/instansi terkait dan terus berupaya melaksanakannya untuk meningkatkan optimalisasi aset.
3. Lingkungan pengendalian dalam pengamanan aset agar lebih ditingkatkan dan dipelihara dengan baik, seperti lebih menegakkan integritas, nilai etika dan komitmen dalam bekerja, agar penyalahgunaan atau bahkan hilangnya aset tidak terjadi.
4. Meningkatkan komunikasi yang dijalin dengan baik antara pengurus barang agar informasi yang dihasilkan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, disertai dengan bukti dokumen agar dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pengelolaan aset tetap.
5. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Garut yang dilaksanakan secara berkala, agar terhindar dari kehilangan dan berbagai penyalahgunaan aset tetap.

Adapun berdasarkan dari hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Mendapatkan referensi dan teori yang lebih banyak mengenai dengan penelitian yang terkait.
2. Dapat menggali data yang lebih mendalam dari wawancara yang dilakukan kepada lebih banyak narasumber untuk melengkapi informasi data penelitian.
3. Mengambil sampel seluruh SKPD yang terdapat di Pemerintah Daerah dan menambah responden agar hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ervina, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo). Skripsi. Tidak diterbitkan.
- [2] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi ke Sembilan Cetakan Ke Sembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [3] Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018.
- [4] Madesen, Piter, Karamoy, Herman, Lambey, & Linda (2018). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol 9, No.2.
- [5] Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- [9] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Supiarti, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengamanan Barang Milik Negara (Studi Kasus pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung). Thesis. Tidak diterbitkan.